BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 206 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dispakan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Dispakan yang selanjutnya disebut Renstra Dispakan adalah dokumen perencanaan Dispakan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Dispakan yang selanjutnya disebut Renja Dispakan adalah dokumen perencanaan Dispakan untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Dispakan yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dispakan, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Dispakan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dispakan untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Dispakan Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Dispakan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Dispakan Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Dispakan untuk melaksanakan rencana kerja Dispakan.
(2) Renja Dispakan Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Dispakan tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dispakan;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Dispakan dengan dokumen RKPD dan Renstra Dispakan;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dispakan yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Dispakan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Dispakan.
(2) Renja Dispakan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Dispakan Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA DISPAKAN

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Dispakan Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
    a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
    b. bab II hasil evaluasi Renja Dispakan tahun lalu;
    c. bab III tujuan dan sasaran;
    d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
    e. bab V penutup; dan
    f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2) Isi dan uraian dokumen Renja Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA DISPAKAN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Dispakan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Dispakan meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Dispakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dispakan;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Dispakan dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Dispakan.

Pasal 7

(1) Dispakan membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Dispakan.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Dispakan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Dispakan tahun berjalan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.

(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Dispakan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dispakan dan evaluasi hasil Renja Dispakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Dispakan terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Dispakan.

(3) Kepala Dispakan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Dispakan.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Dispakan dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DISPAKAN

Pasal 9

(1) Renja Dispakan dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Dispakan beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Dispakan Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Dispakan tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 206

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) meliputi Rancangan Awal (RANWAL RENJA), Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir (RANHIR RENJA) sebagai acuan perencanaan tahunan kegiatan Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah.

RENJA DISPAKAN tahun 2026 berpedoman pada RKPD tahun 2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Permedagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/Kep-199/dispakan Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 4 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya RENJA DISPAKAN Tahun 2026 sebagai berikut:

a) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

b) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA DISPAKAN Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA DISPAKAN, memuat:

1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

A. Urusan Pangan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.197.104.078 dan terealisasi sebesar Rp. 27.056.393.832 atau 97,95%%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 7 kegiatan, 18 subkegiatan, dengan sasaran yakni menurunnya masalah pangan daerah, berikut rinciannya:

Tabel 2.1 Rincian Program/Kegiatan
Urusan Pangan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2.09	Pangan				28.197.104.078	27.056.393.832	97.95%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	20%	20%	268.833.400	268.001.226	99,69%
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik	52	66	268.833.400	268.001.226	99,69%
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah lumbung pangan yang terfasilitasi	4 unit	8 unit	268.833.400	268.001.226	99,69%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	100%	AKE 99,0%; AKP 116,7 %	19.671.007.970	19.600.697.158	99,64%
		Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	100%	99,0%			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase simpul pangan di desa yang aktif	81%	46%	770.822.400	768.925.158	99.75%
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Lap	12 Lap	59.004.000	58.992.800	99,98 %
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5 unit	5 unit	245.277.400	244.203.000	99,56 %
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan	34 Lap	39 lap	466.541.000	465.729.358	99,83 %

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		pangan dan harga pangan Pokok Strategis					
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan	25%	61,49%	17.724.375.280	17.657.934.550	99,63 %
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	380 Ton	880 Ton	17.724.375.280	17.657.934.550	99,63 %
		Jumlah CPPD komoditas lain tersedia	60,06 Ton	189,2 Ton			
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%)	1	Rasio beras 1,04 ; Rasio Sayur Buah 0,94	1.175.810.290	1.173.837.450	99,83%
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dok	1 dok	24.623.800	24.609.000	99,94%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 lap.	5 lap.	174.868.500	174.508.290	99,79 %
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	5 lap.	5 lap.	976.317.990	974.720.160	99,84 %
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	20%	100%	542.803.600	541.735.310	99,80 %
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100%	100%	46.490.000	46.094.500	99,15 %
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dok.	1 dok.	46.490.000	46.094.500	99,15 %
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KK miskin yang tertangani	20%	100%	496.313.600	495.640.810	99,86 %
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang terintervensi	12.000 KK	12.396 KK	226.993.600	226.815.800	99,92%
		Jumlah Keluarga Beresiko stunting yang terintervensi	3.250 KRS	3.141 KRS			
		Jumlah Rawan Pangan Transien tertangani	-	786 KK			

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok.	1 dok.			
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	5 lap	5 lap	269.320.000	268.825.010	99,82 %
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat keamanan pangan	> 85%	98%	498.430.980	497.476.830	99.81 %
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif)	31 kel.	7 unit.	498.430.980	497.476.830	99.81 %
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok.	1 dok.	285.200.000	284.700.530	99.82 %
2.09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan Kemanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 dok.	1 dok.	213.230.980	212.776.300	99.79 %

*S*umber : Dispakan Kab. Bandung, Tahun 2024

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :

a. Berdasarkan hasil Analisis Situasi Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung tahun 2024, diketahui bahwa konsumsi energi penduduk Kabupaten Bandung berkisar antara 1.957 - 2079 kkal/kapita/hari (93,2% - 99,0% AKE). Konsumsi energi tersebut tergolong normal (90-119%). Dilihat dari Angka Kecukupan Protein (AKP), diketahui rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengonsumsi protein 55,7 – 59,1 gram/kapita/hari (97,8 - 103,7 AKP). Artinya, konsumsi protein penduduk Kabupaten Bandung sesuai anjuran (57 gram/kapita/hari). Dibandingkan tahun 2023, capaian AKE dan AKP tahun 2024 meningkat, namun kelompok pangan yang jumlah konsumsinya berlebih dan yang kurang dari standar ideal tetap/tidak berubah. Kelompok pangan yang dikonsumsi berlebih oleh mayoritas penduduk Kabupaten Bandung adalah padi-padian, minyak dan lemak. Penduduk Kabupaten Bandung rata- rata mengonsumsi padi-padian berlebih 7,3% dari anjuran. Namun dibandingkan tahun lalu, ada penurunan terhadap konsumsi beras. Sedangkan konsumsi kelompok

pangan minyak dan lemak rata-rata berlebih 3,7% dari anjuran. Sementara itu, kelompok pangan yang konsumsinya masih dibawah standar ideal adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Umbi-umbian, sebagai pangan sumber karbohidrat alternatif beras dan terigu nyatanya masih sedikit dikonsumsi penduduk. Konsumsinya baru 60,3% dari anjuran; angka konsumsi tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Kelompok pangan sumber protein hewani sudah hampir mendekati ideal sebesar 89,28% dari anjuran. Sebaliknya, kelompok pangan sumber protein nabati yakni kacang-kacangan baru dikonsumsi 71,42% dari anjuran. Protein hewani yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bandung yaitu telur sebanyak 26.5 gr/kap/hari setara dengan (1/2 butir setara ½ porsi protein). Sedangkan untuk protein nabati yang paling banyak dikonsumsi yaitu tahu dan tempe sebanyak 21.5 gr/kap/hari. Sementara itu, konsumsi sayur dan buah walaupun belum memenuhi anjuran yakni rata-rata baru 73,49% - 82,70% meningkat sebesar 5,05% selama 6 tahun terakhir.

b. Dari aspek ketersediaan, produksi pangan mampu menyediakan energi sebesar 1.474 kkal/kapita/hari (61,4% AKE) dan protein sebesar 36,4 gram/kapita/hari (57,7% AKP). Kegiatan ekspor-impor pangan yang dilakukan Kabupaten Bandung diestimasikan lebih dominan impor dibandingkan ekspor. Sebanyak 20 jenis pangan diimpor dan komoditas yang paling besar jumlahnya adalah beras yaitu sebesar 668.117 ton. Sedangkan jenis pangan yang diekspor Kabupaten Bandung adalah singkong, ubi jalar, kentang, minyak kelapa, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Secara keseluruhan, ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2024 tercatat dapat mencukupi kebutuhan penduduk dengan energi sebesar 2.375 kkal/kapita/hari (99,0 % AKE) dan protein 73,5 g/kapita/hari (116,7 % AKP). Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Bandung tahun 2024 yaitu 89 dari skor ideal 100.

c. Untuk cadangan pangan, selain beras, tahun 2024 CPPD lainnya yang dikelola adalah ikan, daging ayam, minyak goreng dan daging sapi. Penyelenggaraan CPPD tersebut adalah salah satu upaya dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pasokan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan rawan gizi (stunting). Alokasi anggaran CPPD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun 2024, Kabupaten Bandung kembali meraih penghargaan kategori terbaik pertama pengelolaan CPPD tingkat Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.2 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 2022-2024

KOMODITAS	2022	2023	2024
Beras (Kg)	285.749	752.016	870.000
Beras Fortivit (Kg)	10.636	-	10.000
Daging Ayam (Kg)	7.612	-	-
Minyak Goreng (Liter)	46.364	36.360	185.181
Ikan (Kg)	18.401	10.201	4.000
Daging Sapi (Kg)	-	13.500	-
Anggaran (Rp)	6.650.376.800	13.502.636.700	17.158.183.800

d. DISPAKAN dalam upaya penurunan kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi melakukan:

- Pendistribusian CPPD, dengan sasaran penerima: 1) KPM rawan pangan kronis berjumlah 7.383; 2) KPM terdampak bencana/transien berjumlah 35.102; 3) KRS rawan gizi 7.786; 4) KPM terdampak inflasi 135.891.
- Peningkatan kegiatan ekonomi melalui fasilitasi usaha budidaya ikan dan lumbung pangan di desa lokus potensi rentan rawan pangan.
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Mandiri (GPM) sebanyak 63 kali di seluruh kecamatan, 32 diantaranya dilaksanakan mandiri melalui pemberdayaan kios pangan.

e. Pada aspek pemanfaatan pangan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi diantaranya:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gerakan sadar konsumsi terutama ibu rumah tangga tentang arti penting pola konsumsi pangan B2SA bagi tubuh agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Meningkatkan akses rumah tangga dan/atau perseorangan atas pangan B2SA secara fisik (pendapatan, stabilisasi harga) dan ekonomi (tersedianya pasar/toko pangan yang mudah dan dapat cepat dijangkau).

f. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Bandung tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan yaitu:

- Pengawasan Pre Market, berupa rekomendasi PSAT PDUK, yaitu periizinan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengedarkan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri dalam kemasan eceran. Jumlah nomor registrasi PSAT PDUK yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 179, 54 nomor diantaranya sudah mendapatkan label hijau atau sudah memenuhi sanitasi higiene minimal level 3.
- Pengawasan Post Market, atau pengawasan yang dilakukan terhadap produk setelah beredar di pasaran melalui rapid test kit pestisida dan uji laboratorium, dengan hasil terhadap 200 sampel uji, 97% memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu pestisida. Adapun hasil uji lab terhadap 100 sampel uji, 100% memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu pestisida dan logam berat (Pb).
- Pengawasan label produk pangan segar di supermarket.
- Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait.

g. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam urusan pangan telah mendapatkan beberapa penghargaan pada tingkat nasional dan tingkat provinsi diantaranya:

1. Dinas Terbaik Pelaksana Program GENIUS 2024 Kategori Kabupaten/Kota Tingkat Nasional oleh Badan Pangan Nasional
2. Juara I Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tingkat Provinsi oleh Provinsi Jawa Barat
3. Juara I Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi oleh Provinsi Jawa Barat
4. Juara 3 Program Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Tingkat Provinsi oleh Provinsi Jawa Barat
5. Sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dengan Peringkat “BAIK”

B. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan ini dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN) dengan anggaran sebesar Rp.14.826.723.934,- dan terealisasi sebesar Rp.14.504.314.052,- atau 97.83% yang digunakan untuk

melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 16 subkegiatan, dengan sasaran yaitu meningkatnya daya saing sektor perikanan, berikut rinciannya:

Tabel 2.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rp 14.826.723.934,00		Rp 14.504.314.052,00	97,83
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi ikan tangkap (Persentase)	3,00 Persen	Rp 257.951.060,00	3,30 Persen	Rp 256.405.300,00	99,40
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang ditebar ikan (%)	11,00 Persen	Rp 257.951.060,00	12,00 Persen	Rp 256.405.300,00	99,40
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1,00 Unit	Rp 257.951.060,00	1,00 Unit	Rp 256.405.300,00	99,40
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya (%)	2,76 Persen	Rp 13.152.789.058,00	3,40 Persen	Rp 12.835.115.857,00	97,58
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) (%)	100,00 Persen	Rp 119.440.608,00	128,00 Persen	Rp 117.426.450,00	98,31
3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	60,00 Rekomendasi	Rp 119.440.608,00	77,00 Rekomendasi	Rp 117.426.450,00	98,31
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok perikanan (Kelompok)	192,00 Kelompok	Rp 2.881.318.000,00	231,00 Kelompok	Rp 2.855.111.427,00	99,09
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	109,00 Kelompok	Rp 2.675.930.000,00	164,00 Kelompok	Rp 2.650.777.227,00	99,06
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20,00 Kelompok	Rp 71.395.000,00	34,00 Kelompok	Rp 71.394.600,00	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	20,00 Kelompok	Rp 36.116.000,00	20,00 Kelompok	Rp 35.960.800,00	99,57
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20,00 Kelompok	Rp 97.877.000,00	20,00 Kelompok	Rp 96.978.800,00	99,08
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi ikan budidaya (Ton)	16.500,00 Ton	Rp 10.152.030.450,00	17.201,00 Ton	Rp 9.862.577.980,00	97,15
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,00 Dokumen	Rp 76.327.000,00	2,00 Dokumen	Rp 75.836.500,00	99,36
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84,00 Unit	Rp 8.933.183.400,00	87,00 Unit	Rp 8.662.215.090,00	96,97
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Unit	Rp 957.550.000,00	4,00 Unit	Rp 941.492.340,00	98,32
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1,00 Dokumen	Rp 67.855.050,00	13,00 Dokumen	Rp 67.845.500,00	99,99
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10,00 Orang	Rp 117.115.000,00	36,00 Orang	Rp 115.188.550,00	98,36
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100,00 Persen	Rp 64.940.692,00	100,00 Persen	Rp 64.494.100,00	99,31
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina	13,00 POKMASWAS	Rp 64.940.692,00	13,00 POKMASWAS	Rp 64.494.100,00	99,31
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	Rp 64.940.692,00	1,00 Dokumen	Rp 64.494.100,00	99,31

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan (%)	3,00 Persen	Rp 1.351.043.124,00	3,00 Persen	Rp 1.348.298.795,00	99,80
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan (Buah)	5,00 Buah	Rp 110.970.319,00	6,00 Buah	Rp 110.115.865,00	99,23
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2,00 Dokumen	Rp 110.970.319,00	2,00 Dokumen	Rp 110.115.865,00	99,23
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) (Produk)	21,00 Produk	Rp 20.383.575,00	34,00 Produk	Rp 20.033.000,00	98,28
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20,00 Unit Usaha	Rp 20.383.575,00	34,00 Unit Usaha	Rp 20.033.000,00	98,28
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan (%)	21.274,00 Ton	Rp 1.219.689.230,00	20.407,00 Ton	Rp 1.218.149.930,00	99,87
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,40 Ton	Rp 805.334.472,00	0,60 Ton	Rp 804.235.900,00	99,86
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	33,00 Pelaku Usaha	Rp 414.354.758,00	33,00 Pelaku Usaha	Rp 413.914.030,00	99,89

*S*umber : Dispakan Kab. Bandung, Tahun 2024

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut:

a. Capaian produksi benih ikan nila, mas, lele, dan ikan hias di UPTD BBI meningkat 1,4% dari 28.823.380 ekor pada tahun 2023 menjadi 29.209.360 ekor pada tahun 2024. Produksi tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan seiring dengan rehabilitasi sarana prasarana pokok unit pembenihan ikan di UPTD pada tahun 2024 bersumber anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk rehabilitasi kolam ikan, saluran air dan pengadaan calon induk ikan

nila, mas dan lele. Adapun capaian produksi benih ikan di masyarakat yang di tergetkan meningkat sebesar 3%, terrealisasi sebesar 4,50% yaitu 2.155,6 juta ekor pada tahun 2023 menjadi 2.252,6 juta ekor pada tahun 2024. Sedangkan produksi ikan konsumsi pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,45% dari tahun 2023 yakni dari 16.627,49 ton menjadi 17.201,14 ton.

b. Capaian produksi benih dan ikan tersebut berbanding lurus dengan stimulant peningkatan kapasitas usaha perikanan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023, total kelompok masyarakat yang mendapatkan hibah bantuan sarna produksi pembenihan dan pembesaran sebanyak 226 kelompok sedangkan tahun 2024 sebesar 231 kelompok.

c. Capaian produksi olahan ikan pada tahun 2024 sebesar 20.406 ton atau meningkat sebesar 3% dari tahun 2023 (19.812 ton). Permintaan terhadap produk olahan ikan cenderung meningkat akibat COVID 19 yang juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi olahan ikan.

d. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan dan penebaran 97.175 ribu ekor benih ikan di perairan umum (restocking ikan) di 12 lokasi.

Tabel 2.4 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi
di Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

No	Jenis Usaha	Tahun 2020 (Ton)	Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022 (Ton)	Tahun 2023 (ton)	Tahun 2024 (ton)	Pertumbuhan (%)
1	Kolam Air Tenang	14.681,70	15.084,23	15.288,78	16.079	16.681	2,72%
2	Sawah	510,12	554,69	607,58	548,49	520,35	0,40%
3	Perairan Umum	237,81	249,20	256,70	264,45	273,18	2,97%
	Jumlah	14.994,38	15.429,63	15.888,12	16.153,06	17.474,53	3,31%

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang memuat seluruh urusan yaitu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, urusan pangan dan urusan kelautan dan perikanan termuat dalam tabel TC-29 dibawah ini.

Tabel 2.5 TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026

Kabupaten Bandung

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP; 2) Nilai IKM	83.50; 84.82	82.85;84.66	83;84.67	-	-	83 poin	82,85	99%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Peoran Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	8	4	2	50%	4	14	70%
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rapat/desk terkait perencanaan dan pelaporan	4	4				-	4	100%
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	16	8	4	2	50%	4	14	88%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	12	6	3	50%	6	21	70%
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Peoran Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213	24	45	43	96%	45	112	53%
2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	2	1	0	0%	1	3	60%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2	09	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	24	12	5	42%	12	41	68%
2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	4,00		1	0	0%	1	1	25%
2	09	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah rapat koordinasi bulanan	12	12					12	100%
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	12	12	5	42%	12	29	60%
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	1	0,5	50%	1	3,5	70%
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	4	2	1	50%	2	7	70%
2	09	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	8	4	0	0%	4	12	60%
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	1	0,5	50%	1	2,5	50%
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	10	4	2	0	0%	2	6	60%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						dan Penggandaan yang Disediakan								
2	09	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17000	6800	1	0,5	50%	1	6801,5	40%
2	09	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	4	2	1	50%	2	7	70%
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580	232	116	80	69%	116	428	74%
2	09	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Penunjang Aparatur								
2	09	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1	0,8	80%	1	2,8	
2	09	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7,00	4	1	0	0%	1	5	71%
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	60,00	24	12	6	50%	12	42	70%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12,00	12	12	6	50%	12	30	250%
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
2	09	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	2	1	0	0%	1	3	60%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220,00	86	43	26	60%	43	155	70%
2	09	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80,00	20	20	5	25%	20	45	56%
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00	2	1	1	100%	1	4	80%
2	09	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00		2	2	100%	2	4	200%
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	100%	40%	20%		0%	20%	60%	60%
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik	62,00	47	52	0	0%	52	99	160%
2	09	02	2,01	0006	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur	20	10	5	0%	0%	5	1500%	75%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia								
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
						Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)							0%	
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Persentase simpul pangan di desa yang aktif	100%	72%	81%		0%	81%	153%	153%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
2	09	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	60,00	24	12	5	42%	12	41	68%
2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	75,00	30	0	0	0%	15	45	60%
2	09	03	2,01	0010	Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	20,00	8	10	0	0%	10	18	90%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Distribusi Pangan Kabupaten/kota									
2	09	03	2,01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24,00	24	12	8	67%	12	44	183%
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan	107%	38%	25%		0%	25%	63%	59%
2	09	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5,00	1	1	0	0%	1	2	40%
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	369,20	369,2	135	171,5	127%	135	675,7	183%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	03	2,02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	24,00		12	0	0%	12	12	50%
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rasio konsumsi beras, sayuran dan terhadap total konsumsi ideal (%)	1,00	1	1		0%	1	2	200%
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5,00	2	1	0	0%	1	3	60%
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	84,00	40	25	0	0%	25	65	77%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Berbasis Sumber Daya Lokal								
2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15,00	6	3	0	0%	3	9	60%
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	100%	40%	20%		0%	20%	60%	60%
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100%	100%	100%		0%	100%	200%	200%
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan	5,00	2	1	0	0%	1	3	60%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan								
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase miskin yang tertangani	100%	40%	20%			20%	60%	60%
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah miskin yang terintervensi	12000			54700			54700	456%
						Jumlah balita stunting yang terintervensi	6366			1456			1456	23%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00		1	0	0%	1	1	#DIV/0!
2	09	04	2,02	q	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	25	10	5	9	180%	5	24	96%
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat keamanan pangan	> 85%	>85%	>85%			>85%		

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif)	155,00	62	31		0%	31	93	60%
2	09	05	2,01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2,00	1	1	0	0%	1	2	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	05	2,01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah umen penguatan embagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4,00	1	1	0	0%	1	2	50%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan si ikan tangkap	15	6%	3%		0%	3%	9%	1%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang ditebar ikan	11	11%	11%		0%	11%	22%	2%
3	25	03	2,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi penebaran ikan (restocking ikan)	50,00	10		8			18	36%
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4,00	1	1		0%	1	2	50%
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase peningkatan	10,42%	4,15%	2,76%			2,76%		

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya								
3	25	04	2,01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perikanan yang memiliki Nomor Izin Ber (kumulatif)	100%	100%	100%		0%	100%	200%	200%
3	25	04	2,01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Ber Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	100	40	60	32	53%	60	132	132%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan								
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok perikanan	807,00	384	192		0%	192	576	71%
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	525	245	130	35	27%	130	410	78%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15	6	3	2	67%	3	11	73%
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah perikanan mendapat sosialisasi akses bantuan pembiayaan	90	30					30	33%
						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	40	20	20	0	0%	20	40	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20	8	4	10	250%	4	22	110%
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi ikan budidaya	17521,00	16116	16500		0%	16500	32616	186%
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	24	12	5	42%	1	30	50%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	24	12	8	67%	12	44	73%
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah induk ikan unggul tersedia	Induk lele 50 , induk mas 800 kg, induk nila 20							
						Jumlah produksi benih	32.558.120		30.637.684	7.376.980	24%		7.376.980	23%
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	2	1		0%		2	40%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4,00	2	1	5	500%	1	8	200%
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan	50,00	20	10		0%	10	30	60%
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina	13,00	13	13	4	31%	13	30	231%
3	25	05	2,01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat dikan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dilaksanakan	14						0	0%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikan dalam Kabupaten/Kota	5	2	1	1		1	4	80%
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan si hasil olahan perikanan	15%	6%	3%		0%	3%	9%	60%
						Persentase capaian si hasil olahan perikanan								

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah pengolahan hasil perikanan diterbitkan	25,00	10	5		0%	5	15	60%
3	25	06	2,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan resiko	5,00	2	1	0	0%	1	3	60%
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif)	30,00	18	21	4	19%	21	43	143%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah yang dilatih Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan diversifikasi nilai tambah pengolahan ikan	100			4	0%		4	4%
						Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Ber pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	40	20	4	20%	20	64	64%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Sesuai Skala Usaha dan Risiko								
3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi hasil olahan perikanan	21702	21064	21.274,0		0%	21.274,0	42338	195%
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye/promosi /kampanye perikanan	60			5		0,5	5,5	9%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40		0,5		0%		0	0%
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pengolahan ikan	1				0%	1	1	100%
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	112	28	28	0	0%	28	56	50%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan kondisi ketahanan pangan, pertumbuhan permintaan pangan tidak boleh lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan di Kabupaten Bandung, dimana sektor perikanan termasuk didalamnya sebagai salah satu sumber pangan protein hewani, terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Selain itu, pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol adalah rendahnya daya beli masyarakat yang miskin secara ekonomi, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Bandung dan tidak mungkin Kabupaten Bandung akan kehilangan potensi dari sebagian sumberdaya manusianya karena kualitasnya menurun.

Mengingat kondisi rawan pangan bisa saja terjadi terutama di pedesaan, dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, maka strategi perwujudan ketahanan pangan yang dapat dilaksanakan adalah: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan; dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan rawan pangan.

Bentuk pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan difokuskan pada upaya: (1) Penanganan daerah rawan pangan; (2) Pengelolaan cadangan pangan; (3) Penguatan lembaga distribusi pangan; (4) Pengembangan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan; (5) Peningkatan produktivitas serta partisipasi masyarakat terhadap urusan budidaya perikanan; (6) Peningkatan dayasaing produk perikanan; serta (7) Kajian dan analisis kebijakan pangan. Program kinerja tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tabel TC-30.

Tabel 2.6 TC-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Bandung

NO	Indikator	Standar	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-4)	(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-4)	(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai AKIP			82.35	82.50	83.00	83.25	83.60*	82.70	82.85	82.90	83.25	83.60	
2	Nilai IKM			84.57	84.62	84.67	84.72	84.82	81.12	84.66	83.57	84.72	84.82	
3	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		IKK	2.06	2.09	2.76	3%*	3%*	2.13%	3.00%	3.45%	3%	3%	
4	Persentase peningkatan produksi tangkap		IKK	3%	3%	3%	3%	3%	3.09%	3.02%	3.30%	3%	3%	
5	Persentase peningkatan produksi ikan olahan			3%	3%	3%	3%	3%	3.18%	3%	3%	3%	3%	
6	Persentase penguatan cadangan pangan			8%	30%	25%	25%	19%	21%	52,55%	61.49%	25%	19%	
7	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	beras 1.05; sayur dan buah 0.73	beras 1.09; sayur dan buah 0.74	Beras 1.02 Sayur Buah 0.94	1.00	1.00	
8	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji			> 85%	> 85%	> 85%	90%*	90%*	86,20%	85,09%	98%	> 85%	90%	
9	Skor PPH Konsumsi			86,3**	81,7**	82,3**	86,9*	87,5*	82,2	85,6	85,1	86,9	87,5	IKU Renstra 2025-2029
10	NTUP			100	100	100	100	100	109,18	118,50	118.64	100	100	

Keterangan: *perubahan target berdasarkan Renstra 2025-2029
** IKD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis daerah dengan tugas, pokok dan fungsi: "perumusan kebijakan, pelayanan umum, pembinaan dan penyelenggaran pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan" harus dapat menjawab tantangan tersebut di atas. Berikut adalah beberapa isu global dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- Kemiskinan;
- Sistem teknologi informasi; *internet of things*
- Pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- Masih rendahya daya saing produk perikanan sehingga masih belum memberikan nilai tambah untuk pelaku usaha.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas pada tahun 2024 serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

Tabel 2.7 Permasalahan dan Solusi Tahun Anggaran 2024

No	Permasalahan	Solusi
1	Isu stunting juga kenaikan harga bahan pokok strategis berpengaruh bagi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung terutama aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan.	Penguatan cadangan pangan pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi dan penanganan rawan pangan dan gizi
2	Rendahnya dayasaing sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat	Membangun sektor perikanan melalui penumbuhan wirausaha baru, penataan sentra/kampung

No	Permasalahan	Solusi
		perikanan, pengembangan pasar, dan optimalisasi fungsi UPTD BBI.

2.4 Review Terhadap RKPD

Dalam proses penyusunan Renja tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memperhatikan program prioritas yang telah tertuang dalam RKPD sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan dan tahun yang akan datang guna terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan. RKPD tahun 2026 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan RENJA PD.

Review terhadap RKPD berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 yang dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyelarasan antara kebijakan *top down* dan *bottom up*.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Menu Musrenbang untuk program kegiatan tahun 2026 antara lain:

1. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Singkong, Ubi Jalar, Kentang dan Pisang
2. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Lainnya
3. Pengembangan Budidaya Ikan Nila
4. Pengembangan Budidaya Ikan Mas
5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele
6. Pengembangan Budidaya Ikan Hias
7. Stimulan sarana dan prasarana pengolahan pemindangan ikan
8. Stimulan sarana dan prasarana pengolahan ikan lainnya

Untuk selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menanggapi usulan masyarakat tersebut dan mengakomodir sepanjang

sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan verifikasi CPCL dan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun akhir dari periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 namun sekaligus tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. RENJA 2026 disusun memuat pemutakhiran arah pembangunan, tujuan, sasaran dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan khususnya pangan, kelautan dan perikanan. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, kebijakan nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu: 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan; 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah; 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengusung tema

“Melanjutkan Kemandirian Jawa Barat”. Tema tersebut memiliki makna bahwa dampak pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi seluruh sektor pembangunan terutama sektor ekonomi yang memerlukan pemulihan dan penormalan melalui upaya pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian.

Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memperhatikan beberapa azas, yaitu:

- Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya;
- Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
- Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
- Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya ialah:

- Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.
- Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap pembangunan wilayah.
- Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah.
- Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang

Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

Adapun misi-misi yang dibuat sebagai turunan dari visi yang ada ialah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak
2. Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
3. Misi Ketiga : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
4. Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi
5. Misi Kelima : Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dimana Misi yang sejalan dan harus didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dan TUPOKSI-nya ialah misi nomor 2 dengan sasaran meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2026 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit,	Meningkatkan Pembangunan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta		Skor PPH Konsumsi	87,5
				Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	100

Visi	Misi	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran	Target
Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas	Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	kesejahteraan pembudi daya perikanan	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	89,25 %
			Meningkatnya produksi akuakultur	Persentase peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	1%

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya perikanan				Skor Pola Pangan Harapan	
					Nilai NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)	
		Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah			Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Persentase AKE	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				Berkurangnya Rantai Pasok	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
					Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
				Berkurangnya Rantai Pasok	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Konsumsi Pangan B2SA	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
				Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
					Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				Dimanfaatkannya FSVA dan SKPG	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
				Meningkatnya akses pangan di daerah rentan rawan pangan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Dimanfaatkannya FSVA dan SKPG	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Meningkatnya akses pangan di daerah rentan rawan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
					Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0008 - Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
				Meningkatnya Infrastruktur Logistik Pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.09.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.09.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Meningkatnya Produksi Akuakultur			Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Jumlah Sentra/Kampung Berbasis Perikanan yang Memenuhi Standar	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Hasil Pengawasan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
					Angka Konsumsi Ikan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Meningkatnya pemanfaatan peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
				Meningkatnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
				Meningkatnya penyediaan dan penyaluran hasil olahan perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Meningkatnya pemanfaatan peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Meningkatnya penyediaan dan penyaluran hasil olahan perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya produksi perikanan budidava		Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Meningkatnya legalitas pelaku usaha perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya budi daya ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Meningkatnya sarana budi daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				Meningkatnya budi daya ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Meningkatnya legalitas pelaku usaha perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	3.25.04.2.01.0002 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
				Meningkatnya sarana budi daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				Meningkatnya Revitalisasi di Perairan Umum	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026, merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-1 RPJMD Kabupaten Bandung. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan RENJA pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih terbagi ke dalam 3 (tiga) urusan, yaitu 1) urusan

pemerintahan daerah kab/kota, 2) urusan bidang pangan dan 3) urusan bidang kelautan dan perikanan.

Sebagaimana RKPD Tahun 2026, pagu anggaran RANHIR Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp30.519.436.163,00 terdiri dari: 16.095.184.000,00 pagu Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, pagu urusan pangan Rp7.226.874.263,00 dan pagu kelautan perikanan Rp7.197.377.900,00. Alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai 9 program, 23 kegiatan dan 63 subkegiatan.

Pada tahapan perumusan program dan kegiatan tersebut jika rumusan tidak sesuai dengan RKPD baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, maka dapat diteliti kembali dan disesuaikan kembali. Adapun rumusan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 tertuang pada TC-33 dibawah ini.

Tabel 3.3 TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			30.519.436.163,00					23.985.793.563,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.322.058.263,00					20.740.759.363,00
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			23.322.058.263,00					20.740.759.363,00
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai MR Nilai IRB	60,5 Poin 80,1 Poin	16.095.184.000,00				-	13.178.492.463,00
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83 Poin 100 %	128.000.000,00			ASN	-	205.000.000,00
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		85.000.000,00
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		15.000.000,00
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		5.000.000,00
	2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		50.000.000,00
	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	91 Data	15.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
										n, Semua Kel/Desa				
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	12.282.428.000,00			ASN	-	9.736.667.663,00
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	12.255.428.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		9.723.447.663,00
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		2.000.000,00
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		11.220.000,00
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 %	172.256.000,00			ASN	-	190.000.000,00
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		50.000.000,00
	2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		90.000.000,00
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	32.256.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		50.000.000,00
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	757.500.000,00			ASN	-	727.500.000,00
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		20.000.000,00
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		300.000.000,00
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		60.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
										n, Semua Kel/Desa				
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		30.000.000,00
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		110.000.000,00
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		17.500.000,00
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		30.000.000,00
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		10.000.000,00
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		150.000.000,00
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	105.000.000,00			ASN	-	300.000.000,00
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Lapangan yang Disediakan			n, Semua Kel/Desa				
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		50.000.000,00
	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		250.000.000,00
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.100.000.000,00			ASN	-	1.449.324.800,00
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		250.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		1.199.324.800,00
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	540.000.000,00			ASN	-	570.000.000,00
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		30.000.000,00
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		250.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		40.000.000,00
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		250.000.000,00
	2	09	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	100 %	10.000.000,00			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0,00
	2	09	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
2	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan masyarakat yang aktif di Kabupaten Bandung	8 %	250.000.000,00				-	300.000.000,00
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lumbung pangan yang beroperasional baik	8 %	250.000.000,00			BUMDes, POKTAN, GAPOKTAN	-	300.000.000,00
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik								
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BUMDes, POKTAN, GAPOKTAN		300.000.000,00
3	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	100 %	5.894.849.263,00				-	6.404.189.900,00
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase AKE Ketersediaan	100 %	1.121.297.400,00			Kios Pangan, Masyarakat	-	902.295.400,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
						dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat		71.744.000,00
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	195.843.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat		67.500.000,00
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota								
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12 laporan	170.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat		260.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	525.454.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat		157.051.400,00
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota								
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	150.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat		221.000.000,00
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat		125.000.000,00
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD)	1 rasio	3.773.551.863,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	3.927.067.200,00
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		50.000.000,00
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	221.155 Ton	3.773.551.863,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		3.877.067.200,00
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal)	1 rasio	1.000.000.000,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	1.574.827.300,00
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		50.000.000,00
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		800.000.000,00
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun								
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	600.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		724.827.300,00
4	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11 %	625.000.000,00				-	450.000.000,00
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100 %	300.000.000,00			Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung	-	50.000.000,00
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Panga		50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
										n, Semua Kel/Desa		n Kab. Bandung		
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi	100 %	325.000.000,00			Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung	-	400.000.000,00
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung		200.000.000,00
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota								
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung		50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi								
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung		150.000.000,00
5	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 %	457.025.000,00				-	408.077.000,00
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk PSAT yang memiliki sertifikasi PSAT - PDUK	100 %	457.025.000,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	408.077.000,00
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan								
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	15 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		100.000.000,00
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	282.025.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		150.000.000,00
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan								
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		158.077.000,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.197.377.900,00					3.245.034.200,00
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.197.377.900,00					3.245.034.200,00
6	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	3 %	150.000.000,00				-	175.000.000,00
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang terevitalisasi	10 %	150.000.000,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	175.000.000,00
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9 Unit	150.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		175.000.000,00
7	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	3 %	5.699.739.200,00				-	2.011.137.000,00
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha	14,5 %	100.000.000,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	145.000.000,00
	3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal	70 Rekomendasi	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		145.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan							
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	17521 ton	3.407.313.000,00			POKDAKAN	-	674.810.000,00
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	75 Kelompok	1.996.463.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKDAKAN		474.810.000,00
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	227.350.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKDAKAN		100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 Kelompok	1.183.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKDAKAN		100.000.000,00
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase kebutuhan sarana budidaya ikan yang terpenuhi	100 %	2.192.426.200,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	1.191.327.000,00
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76.327.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		76.327.000,00
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	1.401.099.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		450.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
										n, Semua Kel/Desa				
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		100.000.000,00
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25366 Unit	325.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		325.000.000,00
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat								
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	140.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		140.000.000,00
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0 Unit	150.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		100.000.000,00
8	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sentra/Kampung berbasis perikanan yang memenuhi standar	2 sentra	120.000.000,00				-	100.000.000,00
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase sentra/kampung yang menerapkan hasil pengawasan	100 %	120.000.000,00			POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR	-	100.000.000,00
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota								
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	18 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR		25.000.000,00
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	16 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR		25.000.000,00
	3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	9 Orang	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR		50.000.000,00
9	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga	14.45 kg/kap/thn	1.227.638.700,00				-	958.897.200,00
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan yang digunakan	20 %	75.000.000,00			POKLAHSAR	-	75.000.000,00
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKLAHSAR		75.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
							berdasarkan skala usaha dan risiko							
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar yang memiliki sertifikat kompetensi	7,4%	75.000.000,00			POKLAHSAR	-	150.000.000,00
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko								
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKLAHSAR		150.000.000,00
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)	Persentase Peningkatan Ketersediaan ikan	3 %	1.077.638.700,00			Masyarakat Kab. Bandung	-	733.897.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
						Daerah Kabupaten/ Kota								
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,8 Ton	613.797.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		433.897.200,00
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	463.841.500,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung		300.000.000,00
	J U M L A H								**30.519.436.163,00**					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			30.519.436.163,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.322.058.263,00			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			23.322.058.263,00			
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai MR Nilai IRB	60,5 Poin 80,1 Poin	16.095.184.000,00			
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83 Poin 100 %	128.000.000,00			ASN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	91 Data	15.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	12.282.428.000,00			ASN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	12.255.428.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 %	172.256.000,00			ASN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	32.256.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	757.500.000,00			ASN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Bangunan Kantor yang Disediakan			n, Semua Kel/Desa		
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
										n, Semua Kel/Desa		
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
										n, Semua Kel/Desa		
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	105.000.000,00			ASN
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.100.000.000,00			ASN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	540.000.000,00			ASN
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN
	2	09	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	100 %	10.000.000,00			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2	09	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
2	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan masyarakat yang aktif di Kabupaten Bandung	8 %	250.000.000,00			
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lumbung pangan yang beroperasional baik	8 %	250.000.000,00			BUMDes, POKTAN, GAPOKTAN
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BUMDes, POKTAN, GAPOKTAN
3	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	100 %	5.894.849.263,00			
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase AKE Ketersediaan	100 %	1.121.297.400,00			Kios Pangan, Masyarakat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	195.843.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12 laporan	170.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	525.454.400,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	150.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kios Pangan, Masyarakat
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD)	1 rasio	3.773.551.863,00			Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal						
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	221.155 Ton	3.773.551.863,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal)	1 rasio	1.000.000.000,00			Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	600.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
4	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11 %	625.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100 %	300.000.000,00			Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi	100 %	325.000.000,00			Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Rentan Rawan Pangan Kab. Bandung
5	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 %	457.025.000,00			
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk PSAT yang memiliki sertifikasi PSAT - PDUK	100 %	457.025.000,00			Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	15 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	282.025.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.197.377.900,00			
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.197.377.900,00			
6	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	3 %	150.000.000,00			
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang terevitalisasi	10 %	150.000.000,00			Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9 Unit	150.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
7	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	3 %	5.699.739.200,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha	14,5 %	100.000.000,00			Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	70 Rekomendasi	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	17521 ton	3.407.313.000,00			POKDAKAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	75 Kelompok	1.996.463.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKDAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	227.350.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKDAKAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 Kelompok	1.183.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKDAKAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase kebutuhan sarana budidaya ikan yang terpenuhi	100 %	2.192.426.200,00			Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76.327.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	1.401.099.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25366 Unit	325.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	140.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0 Unit	150.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
8	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sentra/Kampung berbasis perikanan yang memenuhi standar	2 sentra	120.000.000,00			
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase sentra/kampung yang menerapkan hasil pengawasan	100 %	120.000.000,00			POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	18 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	16 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
	3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan						
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	9 Orang	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKMASWAS, POKDAKAN, POKLAHSAR
9	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga	14.45 kg/kap/thn	1.227.638.700,00			
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan yang digunakan	20 %	75.000.000,00			POKLAHSAR
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKLAHSAR
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar yang memiliki sertifikat kompetensi	7,4% undefined	75.000.000,00			POKLAHSAR
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	14
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	POKLAHSAR
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan ikan	3 %	1.077.638.700,00			Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,8 Ton	613.797.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	463.841.500,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat Kab. Bandung
								J U M L A H	**30.519.436.163,00**			

BAB V
PENUTUP

RENJA Tahun 2026 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan. Selanjutnya, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2026 diperlukan perubahan, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Soreang, 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

ttd.

INA DEWI KANIA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

2.1	Rincian Program/Kegiatan Urusan Pangan Tahun Anggaran 2024
2.2	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 2022 - 2024
2.3	Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024
2.4	Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi di Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2024
2.5	TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung
2.6	TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
2.7	Permasalahan dan Solusi Tahun Anggaran 2024
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026
3.2	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan
3.3	TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp / Fax (022) 5891695 Soreang 40911

SURAT PERINTAH

NOMOR 100.3.5.4/068/Dispakan

Nama : Ir. Hj. INA DEWI KANIA MP
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

MEMERINTAHKAN

Kepada :
a. Nama : **Terlampir**
b. Jabatan : Terlampir

Hari,Tanggal : Senin - Kamis, 6 Januari 2025 s/d 31 Juli 2025 Tempat : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Untuk : Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2026

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Ir. Hj. INA DEWI KANIA MP
Pembina Tingkat I NIP. 196904091994032007

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Lampiran 1
Nomor : 100.3.5.4/068/Dispakan
Tanggal : 6 Januari 2025
Hal : Surat Perintah Tim Penyusun Rencara Kerja (RENJA) Dinas Ketahanam Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2026

DAFTAR TERLAMPIR

No	Daftar Telampir
1	AKHMAD RIFA'I S.Sos, M.M 196801011996031005 Pembina Tingkat I - IV/b Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
2	Hj HASLILI LINDAYANI LUBIS SE, MM 197009141997032001 Pembina - IV/a Kepala Bidang Distribusi, Konsumsi Dan Keamanan Pangan
3	LENY NURLIANI S.Sos 197404131999012001 Pembina - IV/a Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan
4	SYAEFUL ARGANDI SP., M.P 198211042011011001 Penata Tingkat I - III/d Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5	ASEP SUKANDAR ST, M.Si 197503012010011002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Bidang Usaha Perikanan
6	NURZANAH S.Pi., M.E. 198112232009 012002 Penata Tingkat I - III/d Perencana Ahli Muda Sekretariat
7	GITA NADYA SANI S.E 199512182022032016 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat

Verifikator

Nomor : 100.3.5.4/068/Dispakan

Tanggal : 6 Januari 2025

Hal : Surat Perintah Tim Penyusun Rencara Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2026

DAFTAR VERIFIKATOR

No.	Tanggal Verifikasi	Verifikator	Statu
1	2025-05-06 08:44:06	**NURZANAH S.Pi., M.E.** PERENCANA AHLI MUDA	✓
2	2025-05-06 08:44:52	**AKHMAD RIFA'I S.Sos, M.M** SEKRETARIS DINAS	✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :100.3.5.4/068/Dispakan
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

I.	Penanggungjawab	:	Ir. Hj. Ina Dewi Kania, MP
II.	Ketua	:	Akhmad Rifa'I S.Sos, MM
III.	Anggota	:	1. Hj. Haslili Lindayani Lubis, SE., MM
			2. Leny Nurliani, S.Sos
			3. Syaeful Argandi, SP., MP
			4. Asep Sukandar, ST., M.Si
			5. Nurzanah, S.Pi.,ME.,MPP
			6. Gita Nadya Sani, SE

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG

Ir. Hj. INA DEWI KANIA, MP
Pembina Tk. 1
NIP. 19690409 199403 2 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 100.3.5.4/068/Dispakan
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

I. **PENANGGUNGJAWAB**
- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

II. **KETUA**
- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanan oleh tim penyusun;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil pekerjaan tim penyusun;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

III. **ANGGOTA**
- Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan RENJA tahun 2026;
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2026;
- Merumuskan program kegiatan prioritas untuk RENJA tahun 2026 bersama dengan tim yang dipimpin oleh Ketua Tim dan dikoordinir oleh Perencana;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG

Ir. Hj. INA DEWI KANIA, MP
Pembina Tk. 1
NIP. 19690409 199403 2 007